

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok orang dalam suatu organisasi dengan menggunakan wewenang dan tanggung jawab mereka masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja ini harus dicapai secara legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Menurut (Afandi, 2019:83) Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang bekerja untuk suatu organisasi, yang merupakan hasil dari prestasi, unjuk kerja, atau hasil kerja yang dicapainya saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. (Rivai, 2019:46) Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan output atau tingkah laku dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok di dalam organisasi. Kinerja ini dilakukan semua bagian, peringkat, dan jabatan organisasi melakukan ini.

Kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik suatu organisasi mengelola uang dan siapa yang bertanggung jawab. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Sebagaimana didefinisikan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dilakukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan cara yang diukur dan tepat. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikenal sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan adalah tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Djafar, 2023:13).

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Halim, 2021:78). Kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan Pemda dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan Pemerintah daerah

adalah tingkat efektivitas dan efisiensi Pemda dalam menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, dengan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Suharto, 2021:183).

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian operasi keuangan pemerintah daerah yang mencakup realisasi anggaran dan anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau undang-undang selama periode anggaran.

2.1.2. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Hasil penilaian dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat *good governance*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berikut ini beberapa tujuan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Penilaian kinerja keuangan membantu memastikan bahwa pemerintah daerah menggunakan dana publik secara bertanggung jawab dan transparan. Hasil penilaian dapat digunakan untuk melacak dan mengevaluasi bagaimana dana publik digunakan, dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Penilaian kinerja keuangan dapat membantu pemerintah daerah untuk menemukan area-area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi area di mana terdapat pemborosan atau inefisiensi, dan dengan mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja.

3. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Penilaian kinerja keuangan dapat membantu pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi area di mana kualitas

layanan publik dapat ditingkatkan, dan dengan mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Penilaian kinerja keuangan dapat membantu meningkatkan keyakinan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah menggunakan dana publik secara bertanggung jawab dan transparan, dan bahwa mereka berkomitmen untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi.

5. Mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan

Penilaian kinerja keuangan dapat membantu pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi area di mana pemerintah daerah tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan, dan dengan mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan.

6. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Penilaian kinerja keuangan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi area di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka, dan dengan mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Sedangkan tujuan penilaian kinerja keuangan pemerintah menurut (Mardiasmo, 2021:121) terdapat 3 tujuan utama penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah:

1. Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah

Penilaian kinerja keuangan membantu mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Hasil penilaian menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk menyusun strategi peningkatan kinerja di masa depan.

2. Membantu dalam Pembuatan Keputusan dan Alokasi Sumber Daya

Informasi dari penilaian kinerja keuangan membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Hasil penilaian menjadi acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang perlu diprioritaskan.

3. Mewujudkan Pertanggungjawaban Publik dan Komunikasi Kelembagaan yang Baik

Penilaian kinerja keuangan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (Mardiasmo, 2021:104)

Faktor Internal:

1. **Kemampuan Keuangan:** Ketersediaan dana yang cukup dan kemampuan mengelola keuangan dengan baik merupakan faktor penting dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal.
2. **Sistem Pengendalian Internal:** Sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien membantu memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan mematuhi aturan yang berlaku.
3. **Sumber Daya Manusia (SDM) :** Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah sangatlah penting.
4. **Kepemimpinan:** Kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang akuntabel dan transparan.

Faktor Eksternal:

1. **Kondisi Makroekonomi:** Kondisi makroekonomi yang stabil dan kondusif dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah.
2. **Kebijakan Pemerintah Pusat:** Kebijakan pemerintah pusat, seperti transfer dana dan peraturan perundang-undangan, dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
3. **Kondisi Sosial dan Politik :** Stabilitas sosial dan politik dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

2.1.4. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Syamsi, 2022:17). Indikator kinerja dapat digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal, tetapi hanya sebagai indikasi kinerja. Ini dapat digunakan oleh pihak internal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta menurunkan biaya. Ini terkait dengan tujuan dari organisasi pemerintah daerah. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurut (Mulyamto, 2020:4)

1. Indikator Masukan (*Inputs*): Setiap hal yang perlu untuk menjalankan aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang disebut sebagai indikator masukan. Misalnya, dana yang dibutuhkan, jumlah karyawan yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang dihabiskan.
2. Indikator Proses (*Process*): Indikator proses menunjukkan ukuran kegiatan dalam hal kecepatan, ketepatan, dan akurasi pelaksanaannya. Contoh indikator proses termasuk mematuhi peraturan dan standar yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memproduksi layanan jasa.
3. Indikator Keluaran (*Output*): Output adalah hasil yang diharapkan dari kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Misalnya, jumlah barang atau jasa yang diproduksi serta kecepatan produksi barang dan jasa tersebut.
4. Indikator Hasil (*Hasil*): Indikator hasil menunjukkan bagaimana kegiatan berfungsi dalam jangka pendek. Misalnya, kualitas barang dan jasa yang dibuat serta produktivitas pekerja
5. Indikator Manfaat (*Benefit*): Tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat adalah contoh tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (*Impact*): Indikator dampak adalah Pengaruh yang bersifat positif atau negatif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat, dikenal sebagai indikator dampak.

2.1.5. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pemerintah daerah selama periode tertentu (Mardiasmo, 2021). Laporan keuangan merupakan kesimpulan informasi yang didapat dari perusahaan untuk melihat kondisi kinerja keuangan selama periode berjalan dan

untuk mengukur kesehatan perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah data tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan Perusahaan (Hidayat, 2019:4).

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, yang biasanya termasuk neraca, laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, laporan lain, dan materi penjelasan yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan. Selain itu, laporan tersebut juga mencakup skedul dan informasi terkait lainnya, seperti informasi keuangan tentang segmen industri serta geografis; dan bagaimana perubahan harga berdampak. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dimasa mendatang. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan adalah yang terkini untuk neraca dan laba rugi pada waktu tertentu. (Kasmir, 2019:7). Dalam laporan keuangan, kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan digambarkan pada waktu tertentu. (Harahap, 2019:10).

Berdasarkan pemahaman di atas, penulis menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan kesimpulan informasi untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Mencerminkan nilai aktiva, kewajiban dan modal sendiri pada satu periode tertentu. Dan sebagai alat komunikasi antar pihak-phak yang memiliki kewenangan dalam laporan keuangan perusahaan.

Tujuan Laporan Keuangan Pada umumnya tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan kondisi laporan keuangan perusahaan yang sedang berkembang, dan untuk menjadi tolak ukur pengambilan keputusan. Dalam tujuan tersebut, suatu laporan keuangan akan menyajikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan yaitu:

1. Aktiva
2. Kewajiban/hutang
3. Ekuitas
4. Pendapatan
5. Beban/biaya
6. Arus kas

Menurut (Kasmir, 2019:10) Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah sebagai berikut::

1. Menyajikan secara detail mengenai aset perusahaan saat ini, termasuk jenis dan jumlah asset.
2. Menyajikan rincian mengenai kewajiban dan modal Perusahaan, serta jenis dan jumlah masing-masing.
3. Menyajikan rincian mengenai penghasilan yang dihasilkan selama periode waktu tertentu.
4. Menyajikan rincian mengenai jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu.
5. Menyajikan rincian mengenai perubahan aset, kewajiban, dan modal Perusahaan.
6. Menyajikan data mengenai kinerja manajemen perusahaan selama periode waktu tertentu.
7. Berikan rincian mengenai catatan laporan keuangan.
8. Data keuangan lainnya

Dari penjabaran di atas, menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki peran yang penting untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh semua orang untuk pengambilan keputusan. Keterbatasan Laporan Keuangan Menurut (Kasmir, 2019:11) mengemukakan sifat dan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah, yaitu data diambil dari sejarah sebelumnya.
2. Informasi keuangan disajikan secara terbuka dan transparan, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh semua kalangan.
3. Penyusunan laporan keuangan melibatkan estimasi dan pertimbangan-pertimbangan profesional.
4. Laporan keuangan dibuat dengan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Misalnya kerugian dari suatu peristiwa selalu dihitung.
5. Laporan keuangan selalu menggunakan sudut pandang ekonomi daripada sifat normal peristiwa.

2.1.6. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, yang menunjukkan posisinya terhadap APBD. LRA menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang dikelola, bagaimana mereka dialokasikan, dan digunakan, dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran adalah mengukur selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran yang dicapai, sehingga memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian target.

Menurut PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran, laporan ini berfungsi untuk menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya selama periode pelaporan. Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk melaporkan hasil dan anggaran entitas pelaporan. Laporan ini sangat penting bagi kementerian/lembaga karena dapat menunjukkan tingkat pencapaian anggaran. Saat uang masuk atau keluar dari rekening kas negara atau daerah, laporan realisasi anggaran diakui.

Menurut Halkadri, (2019:134) Salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan selama periode tertentu secara tersanding. Dengan kata lain, LRA adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang dibandingkan dengan anggarannya masing-masing.

Catatan atas laporan keuangan akan menguraikan laporan realisasi anggaran secara menyeluruh. Penjelasan ini akan mencakup informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, termasuk kebijakan moneter dan fisikal, serta alasan mengapa ada perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasinya. Penjelasan juga akan mencakup daftar angka yang memerlukan penjelasan tambahan. Laporan Realisasi Anggaran memungkinkan kita untuk mengetahui perkiraan sumber daya ekonomi yang akan diterima guna mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian terkait sumber daya tersebut. Selain itu, laporan ini juga menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sesuai

dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan setidaknya sekali setahun. Jika tanggal laporan entitas berubah dan laporan tahunan dipublikasikan dalam waktu yang lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun, entitas tersebut harus mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan mengapa waktu pelaporan tidak digunakan selama satu tahun.
2. Kenyataan bahwa jumlah perbandingan dalam Laporan Realisasi anggaran dan catatan terkait tidak dapat.

Jika Laporan Realisasi Anggaran tidak tersedia tepat waktu, manfaatnya berkurang. Tidak mungkin bagi entitas pelaporan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran tidak lebih dari enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran karena alasan seperti kompleksitas operasi pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran disusun sedemikian rupa untuk menyoroti berbagai komponen pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, serta alasan perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasinya.

2.1.7. Pos yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran harus setidaknya mencakup hal-hal berikut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010:

1. Pendapatan.
2. Belanja.
3. Transfer.
4. Surplus atau defisit.
5. Penerimaan pembiayaan.
6. Pengeluaran pembiayaan.
7. Pembiayaan neto; dan

2.1.8. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Pelaporan tentang penggunaan anggaran bertujuan untuk memberikan informasi dan anggaran kepada entitas pelaporan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan seberapa banyak target yang telah dicapai oleh legislatif dan eksekutif (PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas).

2.1.9. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja-LRA, transfer-LRA, surplus-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang dibandingkan dengan anggarannya masing-masing. Informasi ini berguna bagi pengguna laporan dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, alokasi, dan penggunaan mereka.
2. Memberikan informasi menyeluruh tentang realisasi anggaran yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektif dan efisien penggunaan anggaran.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas:

1. Telah dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan hemat.
2. Telah dilakukan sesuai dengan peraturan anggaran (APBN/APBD).
3. Telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1.10. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten

Analisis kinerja keuangan Kabupaten adalah kegiatan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mahsun, 2019:26). Analisis kinerja pemerintah desa harus dilakukan untuk menentukan kesiapan desa. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pertimbangan kinerja selama periode pelaporan dan anggaran. Selain itu, dengan menyajikan laporan perbandingan atau secara langsung, laporan ini menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan sumber daya ekonomi

yang akan diterima guna membiayai kegiatan pemerintah desa di masa depan (Habibah, 2019:123).

Untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, rasio keuangan memiliki berbagai tujuan dan fungsi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Namun, Keputusan mengenai hasil dari setiap rasio yang diukur harus dilakukan dengan cermat agar tujuan dan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai (Mahmudi, 2019:102).

2.1.11. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat esentralisasi adalah salah satu rasio keuangan yang dapat menunjukkan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pembangunan. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin kuat kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan desentralisasi (Mahmudi, 2019:145) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria evaluasi untuk menghitung rasio tingkat desentralisasi dapat dilihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Perhitungan Derajat Desentralisasi

No	Presentase %	Kriteria
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Baik
6	>50,01	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2019:145)

Kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi ditentukan oleh kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Kemampuan keuangan daerah untuk menggali, mengelola, dan mengelola keuangan mereka sendiri sebagai daerah otonom jelas (Maemunah, 2020:121).

2.1.12. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi adalah ukuran yang membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan pengeluarannya. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk menilai seberapa efektif pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengukur perbandingan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan dengan anggaran yang telah disiapkan (Mahmudi,2019:142) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efisiensi belanja dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.2

Tabel 2. 2 Kriteria Perhitungan Efisiensi

No	Persentase (%)	Kriteria
1	>40	Tidak Efisien
2	31 – 40	Kurang Efisien
3	21 – 30	Cukup Efisien
4	10 – 20	Efisien
5	< 10	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi, (2019:142)

Rasio efisiensi belanja mengukur perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2019:110).

2.1.13 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik daerah mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target yang telah ditetapkan. (Mahmudi, 2019:143) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria evaluasi untuk menghitung rasio tingkat desentralisasi dapat dilihat dalam Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

No	Presentase	Kriteria
1	>100	Sangat Efektif
2	100	Efektif
3	90-99	Cukup Efektif
4	75-89	Kurang Efektif
5	<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, (2019:143)

Efektivitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan tingkat pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2021:104). Tingkat efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah sesuai rencana. Semakin tinggi rasio efektivitas dalam penerimaan PAD, semakin baik kemampuan daerahnya. Sebaliknya, semakin rendah rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang kurang baik (Maemunah, 2020:130).

2.1.14. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menggunakan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2019:140) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Prov+Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria evaluasi untuk menghitung rasio tingkat desentralisasi dapat dilihat dalam Tabel 2.4

Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Kemandirian (100%)	Kemampuan	Pola Hubungan
1	0%-25%	Rendah Sekali	Instruktif
2	>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
3	>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
4	>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Mahmudi, (2019:140)

Rasio kemandirian mengindikasikan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi partisipasi ini, semakin tinggi pula rasio kemandirian, karena pajak dan retribusi daerah adalah komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan ini menunjukkan kemampuan kemandirian daerah yang lebih baik (Maemunah, 2020:146)

2.1.15 Rasio Keserasian

Rasio keserasian adalah salah satu Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan penjualan dengan aset Perusahaan (Mahmudi, 2019:103). Rasio Keserasian mencerminkan cara pemerintah daerah mengalokasikan dananya antara belanja operasional dan belanja modal dengan efektif. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional, semakin rendah persentase belanja modal yang tersedia untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Secara sederhana, rasio keserasian dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 5 Kriteria Rasio Keserasian

No	Presentase (100%)	Kreteria
1	0% - 50%	Tidak Baik
2	50% - 100%	Baik

Sumber: Mahmudi, (2019:103)

2.1.16. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengindikasikan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah diperoleh dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya, semakin dianggap baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi

apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami peningkatan atau penurunan dalam pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran (Mahmudi, 2019:127). Semakin tinggi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah dicapai setiap periode tahun anggaran. Rumus rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{n1} - PAD_{n0}}{PAD_{n0}} \times 100\%$$

Dimana n^0 = Tahun Awal & n^1 = Tahun Akhir

Tabel 2. 6 Kriteria Rasio Pertumbuhan

No	Presentase (100%)	Kreteria
1	<0% (negatif)	Tidak Baik
2	>0% - 10% (positif)	Baik

Sumber : Mahmudi, (2019:127)

Analisis rasio keuangan ini mengubah data dari laporan keuangan menjadi informasi yang berguna untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan setidaknya dua item keuangan, seringkali dari tahun yang sama.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berhubungan dengan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan Keputusan pembelian dapat disajikan di bawah ini (Putri, 2021) melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun (2014-2018). Penelitian menggunakan sampel berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun (2014-2018) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dinilai kurang efisien karena persentasenya masih berada di bawah 20%.

Menurut Saifrizar, (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Di Kabupaten Bireuen Tahun (2019 – 2021). Penelitian menggunakan sampel data mengenai anggaran pendapatan belanja daerah dan laporan

realisasi anggaran Kabupaten Bireuen, dengan menerapkan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan positif meskipun mengalami fluktuasi.

Menurut Bharata, (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Dalam APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Magelang Tahun (2018-2020) Penelitian menggunakan sampel berupa lapo

ran keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun (2018-2020) dengan menerapkan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal kemampuan keuangan masih rendah untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah, pemerintahan, pembangunan, dan pembangunan sosial masyarakat.

Menurut Sinta, (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap (2017 – 2020) Penelitian menggunakan sampel berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun (2017 – 2020) dengan menerapkan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap dinilai baik berdasarkan tanggapan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, meskipun ada beberapa poin yang perlu diperbaiki.

Menurut Siregar, (2020) melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tahun (2014- 2019). Penelitian menggunakan sampel berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tahun (2014- 2019) dengan menerapkan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian masih rendah, efektivitas PAD dinilai baik, efisiensi dinilai buruk, keserasian dinilai buruk, dan pertumbuhan rasio mengalami penurunan.

Menurut Kurniawan, (2024) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun (2019-2022) menggunakan sampel berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 dengan menerapkan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019-2022 dikategorikan sangat tinggi, dengan indikator lebih dari 70% atau mencapai 144%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu bergantung pada Pemerintah Pusat.

Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
1.	Ratih Asterina Putri (2021)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya(2014 – 2018)	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian dan Rasio Desentralisasi.	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Pemerintah Kota Surabaya dapat dinilai Hasil dari penelitian ini Pemerintah Kota Surabaya dapat dinilai kurang efisien dikarenakan persentase masih dibawah 20%.
2.	Muhamad Saifrizal (2022)	Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Bireuen (2019-2021).	Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan	Anslisis Deskriptif Kuantitatif	Pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi gerak yang fluktuatif.
3.	Risma Wira Bharata (2022)	Analisis Rasio Keuangan Dalam APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (2018-2020	Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal kemampuan keuangan masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah, pemerintahan, Pembangunan dan Pembangunan sosial Masyarakat.
4.	Ghina Sinta (2022)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap (2017 – 2020)	Rasio Kemandirian, ,, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan. Rasio Keserasian	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WYP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan poin yang harus diperbaiki.

5.	Ilda Azilla Siregar (2020)	Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing (2014-2019)	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi,	Analisis Deskriptif Kualitatif	bahwa tingkat kemandirian masih rendah, efektivitas PAD dinilai baik, efisiensi dinilai buruk, keserasian dinilai buruk, dan pertumbuhan rasio mengalami penurunan..
6.	Rudi Kurniawan (2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun(2019-2022)	Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Rasio Keserasian	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022 dikategorikan sangat tinggi karena sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu bergantung pada Pemerintah Pusat.

Sumber : Kampus Terkait (2024)

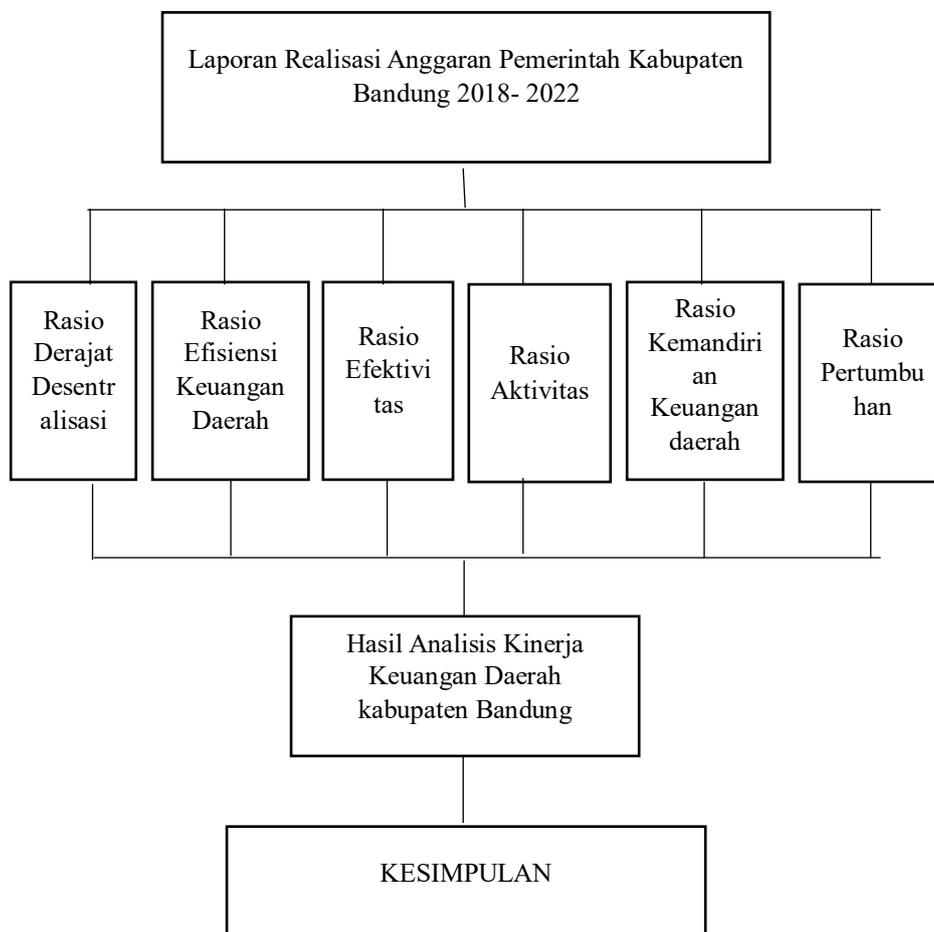
2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Notoadmojo (2018:17), kerangka konsep adalah struktur yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati dalam sebuah penelitian. Sebuah kerangka konsep harus mampu menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang terkandung dalam tujuan studi, yang pada intinya adalah representasi sistematis dari teori-teori yang digunakan untuk memberikan solusi atau alternatif solusi terhadap serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berbentuk diagram, deskripsi kualitatif, atau kombinasi dari keduanya.

Dalam konteks penelitian, kerangka konsep tidak hanya membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis, tetapi juga memandu analisis data dan interpretasi hasil. Penggunaan kerangka konsep yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk mendefinisikan dengan jelas setiap variabel yang terlibat serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan daerah adalah evaluasi terhadap pencapaian target dalam aspek keuangan daerah selama periode tertentu. Evaluasi ini melibatkan

analisis terhadap berbagai indikator keuangan, seperti pendapatan, pengeluaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan keberlanjutan finansial. Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Untuk mengklarifikasi konsep dan mengarahkan penelitian, maka kerangka pemikiran dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Peneliti (2024)